

## **PENGELOLAAN POTENSI MINYAK ATSIRI DENGAN COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI BENTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERKELANJUTAN PADA PROVINSI ACEH**

**Nanda Yuniza**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Aceh, Indonesia

E-Mail: [nanda\\_yuniza@acehprov.go.id](mailto:nanda_yuniza@acehprov.go.id)

### **ABSTRACT**

*Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas ekspor yang mempunyai nilai tinggi. Provinsi Aceh merupakan salah satu pemasok minyak atsiri pada pasar dunia, namun pengembangan potensi minyak atsiri belum dilakukan dengan optimal disebabkan oleh faktor ego sektoral, kurangnya koordinasi, kurangnya anggaran, kurangnya pendampingan pengembangan usaha dan tidak adanya kebijakan untuk mendukung pengembangan usaha dan kurangnya inovasi. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk membangun strategi kolaborasi antar dinas, akademisi dan masyarakat dalam pengelolaan potensi minyak atsiri sehingga pengembangan inovasi dan pemberdayaan minyak atsiri di Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan maksimal. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan dianalisa secara dua tahap dengan menggunakan analisa PETEL dan SWOT. Hasil kajian 1) pengembangan potensi minyak atsiri dilakukan dengan menggunakan analisa dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum. Berdasarkan analisa PETEL diperoleh hasil bahwa untuk melakukan pengembangan potensi minyak atsiri dibutuhkan peran aktif pemerintah melalui kolaborasi dinas terkait dan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai evaluasi dengan komitmen pada pembangunan Aceh; 2) hasil kajian dengan menggunakan analisis SWOT diperoleh strategi strength-threat yakni memaksimalkan penggunaan potensi untuk meminimalisir ancaman. Adapun caranya adalah dengan menggunakan ekonomi Pancasila yang dilaksanakan dengan kontribusi seluruh stakeholder, memaksimalkan peran masyarakat, pembuatan drand desain dan collaborative governance.*

**Kata Kunci:** *minyak atsiri, tanaman nilam, collaborative governance, ekonomi Pancasila, keterlibatan masyarakat.*

### **ABSTRAK**

*Essential oil is one of the export commodities that has high value. Aceh Province is one of the suppliers of essential oils to the world market, but the development of essential oil potential has not been carried out optimally due to ego sektoral factors, lack of coordination, lack of budget, lack of business development assistance and the absence of policies to support business development and lack of innovation. The*

*purpose of this study is to build a collaboration strategy between agencies, academics and the community in managing essential oil potential so that the development of innovation and empowerment of essential oils in Aceh Province can be carried out optimally. This study was conducted using a qualitative approach, and analyzed in two stages using PETEL and SWOT analysis. The results of the study 1) the development of essential oil potential is carried out using analysis of political, economic, social, technological, environmental and legal factors. Based on the PETEL analysis, it was found that to develop essential oil potential, an active role of the government is needed through collaboration between related agencies and the community starting from the planning, implementation to evaluation stages with a commitment to the development of Aceh; 2) the results of the study using SWOT analysis obtained a strength-threat strategy, namely maximizing the use of potential to minimize threats. The method is to use Pancasila economics which is implemented with the contribution of all stakeholders, maximizing the role of the community, creating a design plan and collaborative governance.*

**Keywords:** *Essential Oils, Patchouli Plants, Collaborative Governance, Pancasila Economy, Community Involvement.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Komoditas ekspor Indonesia bukan hanya sumber daya minyak bumi dan batu bara tetapi juga sebagai pemasok minyak atsiri terbesar di dunia. Minyak atsiri mempunyai produk yang terus berkembang, yang dimulai dari produk derivat hingga diversifikasi sehingga menambah nilai ekonomi minyak atsiri (Cahyani & Nirwana, 2018). Minyak atsiri disebut dengan *essential oils*, *etherial oils* atau *volateli oils* yang berasal dari ekstrak alami dari jenis tumbuhan tertentu yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian dan putik bunga. Pada perdagangan pasar internasional terdapat 80 (delapan puluh) jenis tanaman atsiri, dan terdapat 40 (empat puluh) jenis tanaman atsiri yang diproduksi di Indonesia, dan 12 diklasifikasikan sebagai komoditas ekspor (Bappeda Aceh, 2021). Berbagai

jenis bunga di Indonesia mempunyai potensi untuk menghasilkan minyak atsiri namun belum dimanfaatkan dengan optimal (Fikayuniar et al., 2023).

Minyak atsiri digunakan untuk bahan utama industri parfum, kosmetik dan pengobatan (Mayangsari et al., 2022). Banyaknya kegunaan minyak atsiri, maka dapat diketahui bahwa mengembangkan usaha minyak atsiri merupakan investasi yang tepat dan mempunyai pangsa pasar dunia yang bagus (Wiejaya et al., 2023). Namun untuk memberdayakan minyak atsiri terdapat sejumlah hambatan, diantaranya dibuktikan pada kajian Mustamin (2015) yakni 1) bahan baku bunga yang akan dijadikan sebagai minyak atsiri tidak mempunyai kestabilan pasokan; 2) tingginya harga minyak sehingga membutuhkan anggaran pembelian minyak yang tinggi

dalam proses penyulingan minyak atsiri, jika dilakukan penghematan minyak pada proses penyulingan dengan cara meningkatkan tekanan penyulingan maka kualitas minyak atsiri yang diproduksi bernilai rendah; 3) kebijakan pemerintah, institusi riset dan pendidikan tidak dapat bersinergi sehingga pengembangan kualitas produk sulit dilakukan. Dengan demikian pengembangan minyak atsiri masih dibutuhkan strategi sehingga dapat mendongkrak nilai ekonomi.

Hambatan mengenai pengembangan usaha minyak atsiri juga terjadi di Provinsi Aceh yakni dalam hal dukungan pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi dalam hal melakukan penelitian pengembangan untuk memproduksi minyak atsiri dengan kualitas tinggi.

Provinsi Aceh mempunyai beberapa kabupaten penghasil tanaman nilam yang digunakan sebagai bahan baku minyak atsiri yakni Aceh Barat dengan luas lahan rata-rata 5.444 m<sup>2</sup>/KK, Aceh Jaya dengan luas lahan 2.328 m<sup>2</sup>/KK, dan Gayo Lues dengan luas lahan 2.328 m<sup>2</sup>/KK serta Aceh Selatan dengan luas lahan rata-rata 1.379 m<sup>2</sup>/KK (Bappeda Aceh, 2021). Keempat kabupaten tersebut memberikan kontribusi pasokan minyak atsiri dunia sebanyak 33 persen dari 1.200-1.500 ton/tahun yang dipasok oleh Indonesia ke pasar dunia (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa potensi Provinsi Aceh untuk

mengembangkan minyak atsiri sangat besar dengan kualitas yang telah ditetapkan.

Adapun kualitas yang diharapkan untuk dapat dikembangkan dalam memproduksi minyak atsiri di Aceh adalah sebagaimana terdapat pada Standar Mutu Minyak Nilam Berdasarkan SNI No. 06.2386-2006 yang akan diuraikan pada table 1 berikut.

Tabel 1. Standar Mutu Minyak Nilam Berdasarkan SNI No. 06.2386-2006

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1	Warna	-	Kuning muda-coklat kemerahan
2	Bobot jenis 25°C/25°C	-	0,950-0,975
3	Indek bias (nD <sup>20</sup> )	-	1.507-1.515
4	Kelarutan dalam etanol 90% pada suhu 20°C ± 3	-	Larutan jernih atau opalesensi ringan dalam perbandingan volume 1:10
5	Bilangan asam	-	Maks. 8
6	Bilangan ester	-	Maks. 20
7	Putaran optic	-	Maks. 20
8	Patchouli alcohol (C <sub>15</sub> H <sub>26</sub> O)	-	Min, 30
9	Alpha copaene (C <sub>15</sub> H <sub>24</sub> O)	%	Maks. 0,5
10	Kandungan besi (Fe)	%	Maks. 25

Berdasarkan standar mutu minyak nilam yang dapat digunakan sebagai minyak atsiri, maka diperlukan pengembangan kualitas minyak melalui beberapa dukungan berikut.

1. Dukungan pemerintah daerah yakni dalam hal kebijakan untuk

mendukung pengembangan minyak atsiri melalui kolaborasi antar dinas yakni dinas lingkungan hidup, dinas koperasi dan UMKM, dinas perindustrian, Bappeda, dinas pertanian dan dinas pendidikan serta dinas perdagangan. Kolaborasi antar dinas tersebut ditujukan untuk memberikan dukungan pengembangan pengelolaan potensi minyak atsiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing dinas. Adapun harapan kolaborasi dengan masing-masing dinas terkait pengembangan minyak atsiri adalah sebagai berikut.

- a. Dinas lingkungan hidup diharapkan memberikan kontribusi mengenai pengendalian lingkungan dan kelestarian lingkungan khususnya untuk daerah-daerah dengan potensi tanaman nilam di Provinsi Aceh.
- b. Dinas koperasi dan UMKM diharapkan memberikan kontribusi mengenai pengajaran dan pendampingan dalam pembuatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya pada petani-petani tanaman nilam dan usaha penyulingan minyak atsiri.
- c. Dinas Perindustrian diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pengembangan produksi minyak atsiri yang berkualitas tinggi sebagaimana dipersyaratkan dalam SNI No. 06-2385-2006.

- d. Bappeda diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pembuatan grand desain/master plan dalam pengembangan minyak atsiri.
- e. Dinas pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai penelitian dan pembahasan mengenai minyak atsiri beserta pemroduksian minyak atsiri dengan kualitas tinggi.
- f. Dinas pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pembudidayaan tanaman nilam sehingga dapat diperluas bukan hanya pada keempat kabupaten tetapi juga melakukan penelitian pada daerah-daerah lain yang dimungkinkan dapat dibudidayakan tanaman nilam.
- g. Dinas perdagangan diharapkan memberikan kontribusi pada pengaturan sistem perdagangan tanaman nilam, mengatur pasokan sehingga dapat menjaga stabilitas harga minyak atsiri sehingga tidak menimbulkan kerugian pada petani.

## 2. Akademisi

Akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk melakukan inovasi pada produksi tanaman nilam sehingga dapat menjadi komoditas unggul untuk meningkatkan ekonomi dan

kemandirian masyarakat serta daya saing bangsa.

### 3. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pemenuhan tenaga yang berkualitas melalui pemenuhan pasar tenaga kerja, melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat sehingga perencanaan yang dilakukan dalam pengembangan minyak atsiri sesuai dengan peruntukan.

Berdasarkan pada identifikasi kebutuhan dukungan di atas, maka peran pemerintah daerah adalah mengkolaborasikan seluruh dinas, akademisi dan masyarakat dapat diwujudkan melalui suatu strategi. Namun demikian untuk mewujudkan dukungan dari seluruh *stakeholder* sebagaimana disebutkan di atas sangat sulit karena adanya permasalahan ego sektoral antar dinas. Sikap ego sektoral tersebut bukan hanya pada pengembangan suatu program atau potensi daerah tetapi juga terjadi pada proses pembuatan qanun yang merupakan regulasi khusus untuk Provinsi Aceh (Nufiar, 2015). Ego sektoral pada konteks pengelolaan potensi minyak atsiri dibuktikan dengan tidak ada kepedulian dinas-dinas terkait untuk saling bekerjasama dalam melakukan pengembangan potensi daerah yakni minyak atsiri, melainkan dinas-dinas mempunyai program yang sering tumpang tindih dalam hal

pengembangan potensi minyak atsiri karena tidak adanya kolaborasi, koordinasi dan saling mengisi antar dinas sehingga berdampak pada inefisiensi dan inefektifitas pelaksanaan program serta anggaran.

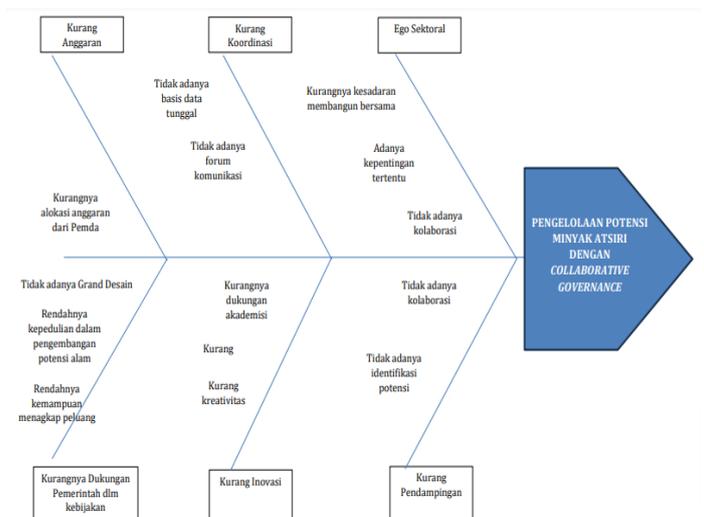
Pengembangan potensi minyak atsiri juga terhambat dengan tidak adanya koordinasi antar pelaku usaha. Pelaku usaha minyak atsiri mempunyai masing-masing cara untuk melakukan perdagangan dan penyulingan sehingga tidak semua minyak atsiri yang dihasilkan memenuhi standar SNI No. 06-2385-2006. Permasalahan bukan hanya pada pelaku usaha tetapi dimulai dari petani yang memiliki hambatan dalam hal penjualan tanaman nilam kepada pengepul. Penjualan tanaman nilam pada pengepul dilakukan dengan harga yang murah karena petani tidak mempunyai jaringan untuk menjual pada tempat-tempat yang mempunyai harga lebih baik. Pengepul tanaman nilam juga memberikan pinjaman alat pada petani untuk melakukan penyulingan, dan hasil penyulingan tersebut ditampung oleh pengepul dengan harga murah karena petani telah memperoleh pinjaman alat penyulingan. Pada konteks ini, petani merupakan pihak yang paling berperan pada penyediaan bahan baku minyak atsiri tetapi petani adalah pihak yang memperoleh keuntungan paling sedikit karena tidak adanya jaringan perdagangan yang dapat memberikan harga lebih baik dibanding pengepul yang memonopoli sistem perdagangan

pada petani. Adanya permasalahan tersebut, maka minyak atsiri belum dapat mendongkrak ekonomi petani dan masyarakat Aceh (Akbar, 2020). Adanya ego sektoral, rendahnya kolaborasi antar pelaku usaha dan tidak adanya jaringan untuk menjual minyak atisir dari petani seharusnya dapat diminimalisir dengan campur tangan pemerintah daerah dalam bentuk pembuatan kebijakan sistem perdagangan minyak atsiri, penentuan harga dan perlindungan lainnya pada petani yang dapat meningkatkan nilai jual minyak atsiri sehingga meningkatkan ekonomi petani dan masyarakat. Permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaan potensi minyak atsiri adalah penggunaan teknologi yang masih sederhana sehingga tidak dapat memenuhi pasar global karena keempat kabupaten di Provinsi Aceh hanya mampu memproduksi minyak atsiri sebanyak 500 kilogram per bulan, sedangkan permintaan apsar global mencapai 2 ton per bulan (Anwar, 2015). Adanya permasalahan tersebut juga disebabkan oleh tidak adanya kolaborasi dengan akademisi dalam hal inovasi dan pengembangan proses penyulingan minyak atsiri yang ramah sumber daya sehingga dapat dilakukan oleh petani. Permasalahan mengenai pengembangan pengelolaan potensi minyak atsiri dapat diselesaikan melalui kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Aceh. Pentingnya kebijakan publik adalah untuk memberikan perlindungan pada

hak-hak masyarakat khususnya adalah petani yang mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku tanaman nilam, menyejahterakan masyarakatnya dan menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

Berdasarkan permasalahan mengenai pengembangan potensi minyak atsiri di Provinsi Aceh, maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan yang muncul dalam program pengembangan tersebut, yakni sebagai berikut.

1. Adanya ego sektoral masing-masing dinas
2. Tidak adanya koordinasi antar pelaku usaha
3. Kurangnya anggaran pengembangan
4. Tidak adanya pendampingan pengembangan usaha
5. Tidak adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan usaha
6. Kurangnya inovasi produk



Gambar 1. Fish Bone Diagram

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* yang mendasari teori-teori yang akan digunakan dalam kajian. *Grand theory* yang digunakan adalah teori negara hukum kesejahteraan atau *welfare state* yakni pemerintahan yang memberikan jaminan atas kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan 5 (lima) pilar kenegaraan yakni a) demokrasi, b) penegakan hukum, c) perlindungan hak asasi manusia, d) keadilan sosial dan e) anti diskriminasi (Ilmar, 2012). Ciri utama dari negara ini adalah adanya kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat, sehingga negara dan pemerintah mempunyai peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum disamping negara mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan (Marbun, 2012).

*Middle theory* merupakan teori yang digunakan untuk memfokuskan pembahasan atas suatu *grand theory*. Adapun *middle theory* yang digunakan dalam kajian ini adalah teori otonomi daerah. Menurut Benyamin Hoesein, otonomi daerah adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat pada bagian wilayah nasional yang berada diluar pemerintahan pusat (Rahayu, 2018). Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut.

1. Urusan pemerintah absolut yakni urusan pemerintah yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintah konkuren yakni urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan pada daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. Urusan pemerintahan umum yakni urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

*Applied theory* pada kajian ini membahas mengenai teori aplikasi untuk menjawab permasalahan dalam kajian. *Applied theory* yang digunakan dalam kajian ini adalah *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan suatu kebijakan dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pelibatan masyarakat untuk merumuskan suatu kebijakan publik, pelibatan masyarakat tersebut meliputi unsur swasta, lembaga-lembaga non profit dan masyarakat (Voets et al., 2021). *Collaborative governance* dibangun sebagai resolusi konflik atau persaingan yang tidak sehat dan penguatan kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah (Huxham et al., 2000). Teori tersebut sejalan dengan kajian yang akan dilakukan.

Pada konteks pelibatan masyarakat untuk melakukan pengembangan potensi minyak atsiri yang ada di Provinsi Aceh, maka diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yakni

dengan menggunakan paradigma *people-centered* dan *participatory*. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat maka terdapat 3 (tiga) aspek yakni sebagai berikut.

1. *Enabling* yakni menciptakan suasana yang dapat mengembangkan potensi masyarakat.
2. *Empowering* yakni melakukan penguatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah-langkah nyata dalam hal penyediaan input, dan menciptakan peluang dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3. *Protecting* yakni memberikan perlindungan dan membela kepentingan masyarakat lemah (Noor, 2011).

Tindakan pemberdayaan masyarakat tersebut belum pernah diimplementasikan dalam pengembangan potensi minyak atsiri di Provinsi Aceh dengan demikian maka perlu dibangun sebuah strategi yang dianalisa dengan menggunakan seluruh potensi dan kondisi yang terjadi di Provinsi Aceh.

## **METODE**

Kajian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni kajian akan disajikan dengan menguraikan secara deskriptif, jelas, factual, sistematis dan cermat (Creswell & Creswell, 2018). Sumber data yang digunakan untuk kajian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara seperti halnya buku, catatan dan arsip serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada kajian ini

adalah analisis PESTEL yakni suatu alat analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor *political, economic, social, technical, environment* dan *legal*. Selanjutnya, setelah diperoleh hasil analisa PESTEL, maka akan dilanjutkan dengan menggunakan analisis SWOT sebagai alat yang digunakan untuk melakukan analisa atas faktor internal dan eksternal dalam pengembangan potensi minyak atsiri di Provinsi Aceh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis PESTEL Pengelolaan Potensi Minyak Atsiri dengan Collaborative Governance di Provinsi Aceh.**

Analisis PESTEL merupakan alat yang digunakan untuk melakukan analisa atas faktor eksternal yang terjadi dalam pengelolaan potensi minyak atsiri di Provinsi Aceh. Analisis tersebut akan dilakukan deskripsi mengenai faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum. Adapaun uraiannya adalah sebagai berikut.

#### **a. Faktor Politik**

Pemerintah Aceh mempunyai kekhususan yang membedakan dengan daerah lain. Adanya kekhususan tersebut atau otonomi khusus, maka pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur ciri khas tersendiri dalam kehidupan masyarakat, memikirkan sendiri dan bekerja bersama seluruh elemen di Aceh untuk membangun Aceh (Rahim, 2018).

Pada konteks pengembangan potensi minyak atsiri di Provinsi Aceh, faktor politis sangat berperan karena berhubungan dengan upaya pemerintah Aceh untuk melakukan transformasi infrastruktur yang terintegrasi dengan tujuan untuk memberikan dukungan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan. Percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian melalui sektor agroindustri (Sari & Nusuary, 2023).

Adanya komitmen untuk melakukan transformasi infrastruktur, maka sangat berkorelasi dengan pengembangan potensi minyak atsiri di Provinsi Aceh. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Aceh merupakan pemasok 33% dari seluruh pasokan minyak atsiri Indonesia ke pasar dunia, dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk melakukan pembangunan pada beberapa infrastruktur berikut.

1) Pembuatan *techno industry cluster*

Pembuatan *techno industry cluster* dapat diimplementasikan pada seluruh daerah walaupun daerah dengan infrastruktur minimalis, daerah perbatasan maupun daerah terpencil (Fitri & Mohammad, 2015). Adapun sistem kerja pembuatan *techno*

*industry cluster* adalah beberapa hal berikut.

- a) Petani mengerjakan penanaman tanaman nilam.
  - b) Petani melakukan penyulingan minyak atsiri
  - c) Menjaga kolaborasi dari 4 (empat) *stakeholder* dalam pengembangan minyak atsiri yakni petani atsiri, penyuling tradisional, CEOS UII (merupakan lembaga riset yang bergerak dalam pengembangan teknologi proses produksi dan kualitas minyak atsiri) dan mitra industri.
- 2) Pelibatan masyarakat dengan pendekatan *collaborative governance*. Pelibatan tersebut meliputi beberapa *stakeholder* berikut.
- a) Pelibatan dinas-dinas terkait pengembangan potensi minyak atsiri yakni dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas koperasi dan UMKM serta dinas lingkungan hidup. Pelibatan seluruh dinas terkait pengembangan minyak atsiri harus dilakukan dengan membuat peraturan bersama dalam pengembangan potensi minyak atsiri. Selanjutnya, dalam pengembangan potensi tersebut perlu dilakukan perencanaan bersama dengan Bappeda khususnya pada penyusunan *grand desain*. Pelibatan dinas-dinas selaku *stakeholder* akan

- meningkatkan partisipasi dinas.
- b) Pelibatan masyarakat yakni dengan cara menginisiasikan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Aceh. Pancasila merupakan landasan untuk melakukan pembangunan, dengan demikian Pancasila memiliki makna dalam pembangunan baik ekonomi maupun bidang lain (Rohmah, 2016). Untuk pengembangan potensi minyak atsiri perlu dilakukan pengembangan dengan menggunakan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yakni pembangunan ekonomi yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mempunyai moralitas untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berusaha.
- c) Pelibatan stakeholder dalam penyusunan grand desain pengembangan potensi minyak atsiri. Pelibatan stakeholder digunakan untuk melakukan identifikasi potensi, hambatan, kekuatan dan kelemahan.
- b. Faktor Ekonomi
- Faktor ekonomi mempunyai peran dalam pengembangan potensi minyak atsiri, hal tersebut dikarenakan pengembangan potensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari unsur perdagangan. Pada konteks pengembangan potensi minyak atsiri terdapat sejumlah hambatan yakni munculnya pengepul yang mencari keuntungan banyak dengan menekan harga beli tanaman nilam atau minyak atsiri dari petani, tidak adanya kebijakan harga dari pemerintah aceh, kekurangan modal dari petani sehingga dapat memicu terjadinya pinjaman modal berbunga tinggi dari pihak lain, dan tidak adanya pendampingan dalam usaha minyak atsiri. Dengan demikian, faktor ekonomi tersebut dapat menjadi penghambat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi minyak atsiri.
- c. Faktor Sosial
- Faktor sosial memberikan pengaruh pada lingkungan sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kajian yang dilakukan oleh Purimahua (2005) terdapat 5 (lima) indikator dalam pengukuran faktor sosial yakni sebagai berikut.
- 1) Sikap yakni semua tindakan evaluative yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek tertentu.
  - 2) Perilaku yakni tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kegiatan dari dalam dirinya.
  - 3) Kebiasaan yakni kegiatan yang terus menerus sehingga akan menjadi bagian dari kehidupan.

- 4) Orang tua yakni nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua terhadap anak sebagai suatu nilai dasar yang dikenal anak.
- 5) Kerabat dekat yakni orang yang mempunyai peran penting dalam kehidupan seseorang dalam hal pengajaran perilaku dan pengenalan nilai (Rizka Zulas et al., 2019).

Berdasarkan indikator faktor sosial tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada masyarakat Aceh belum mempunyai sikap dan perilaku untuk memberikan dukungan atas pengembangan potensi minyak atsiri. Hal tersebut sebagaimana dilaporkan pada kajian Bappeda Aceh bahwa masyarakat Aceh belum mempunyai antusiasme yang tinggi dalam hal pengembangan potensi minyak atsiri dikarenakan tidak adanya edukasi dan pendampingan dalam melakukan usaha minyak atsiri.

- d. Faktor Teknologi  
Faktor teknologi mempunyai peran penting dalam pengembangan potensi minyak atsiri. Pada konteks teknologi maka dapat merujuk pada penggunaan *techno industry cluster* sebagaimana telah diuraikan pada halaman sebelumnya.
- e. Faktor Lingkungan  
Faktor lingkungan memberikan peran dalam pengembangan

potensi minyak atsiri yakni dalam hal menjaga kualitas tanah dan atmosfer untuk tanaman nilam yang digunakan sebagai bahan baku minyak atsiri. Tanaman nilam (*Pogostemon cablin* Benth) menyukai suasana teduh, lembab dengan tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik. Dengan demikian tanah yang dibutuhkan adalah regosol, latosol dan alluvial yang bertekstur lempung pasir atau lempung berdebu (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2012). Sehubungan dengan dibutuhkan kondisi khusus untuk kesuburan tanaman nilam, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh harus dapat membuat program perluasan lahan yang cocok dengan karakteristik tanaman nilam beserta pemeliharaan lingkungannya.

- f. Faktor Hukum  
Faktor hukum mempunyai peran dalam pengembangan potensi minyak atsiri yakni dalam hal pembuatan peraturan Bersama dan regulasi lainnya.

## 2. Analisis SWOT Pengelolaan Potensi Minyak Atsiri dengan Collaborative Governance di Provinsi Aceh

Setelah melakukan analisa PESTEL, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dengan menggunakan

analisis SWOT yang mempunyai tujuan untuk melakukan identifikasi atas faktor internal dan eksternal untuk pengembangan potensi minyak atsiri beserta strategi yang akan dilaksanakan.

Pada kajian ini identifikasi faktor internal dan eksternal dilakukan dengan mengakomodir hasil penilaian dalam kegiatan *Focus Group Discussion* dengan 63 orang *stakeholder* yang terdiri dari perwakilan masyarakat, pelaku usaha, petani tanaman nilam, dinas Perindustrian, dinas lingkungan hidup, Bappeda, dinas perdagangan, dinas koperasi dan UMKM, dinas pertanian, dan akademisi.

a. Indikator internal

Indikator internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Adapun hasil identifikasi adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Faktor Internal

Faktor Internal Utama	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan (strength)</b>			
1) Adanya aturan atau regulasi ekonomi	4,5	3	2,5
2) Adanya dokumen perencanaan Restra mengenai pembangunan infrastruktur Aceh	6	3	3,3
3) Adanya potensi dukungan dinas terkait	6	3	3,3
4) Adanya lahan tanaman nilam	3,4	4	1,9
5) Adanya pengalaman petani dalam pembudidayaan tanaman nilam	6,1	3	3,4
6) Adanya pangsa pasar potensial	4,9	3	2,7
7) Adanya dukungan masyarakat	4,5	3	2,5
8) Adanya standarisasi kualitas produk	4,9	3	2,7
9) Adanya referensi pengembangan kualitas minyak atsiri	6,1	4	3,4
10) Adanya dukungan sumber daya manusia	6,5	3	3,6
<b>Total Kekuatan</b>	<b>52,9</b>	<b>33</b>	<b>29,3</b>
<b>Kelemahan (weakness)</b>			
1) Tidak melakukan identifikasi masalah untuk kebijakan pengembangan potensi minyak atsiri	5,4	4	3
2) Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan	4,7	4	2,6
3) Tidak ada analisa mengenai potensi lahan daerah lain	4,0	3	2,2
4) Kurangnya inovasi dalam pengembangan potensi minyak atsiri	5,6	3	3,1
5) Kurangnya minat masyarakat dalam pengembangan potensi minyak atsiri	5,4	3	3
6) Adanya ego sektoral	5,8	3	3,2
7) Kurangnya koordinasi	4,2	3	2,3
8) Kurangnya anggaran pengembangan dan inovasi	4,3	3	2,4
9) Kurangnya pendampingan dari pemerintah	4,0	3	2,2
10) Kurangnya kebijakan	3,8	3	2,1
<b>Total kelemahan</b>	<b>47,1</b>	<b>34</b>	<b>26,1</b>
<b>Total S-W</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>55,4</b>

b. Indikator eksternal

Table 2. Faktor Eksternal

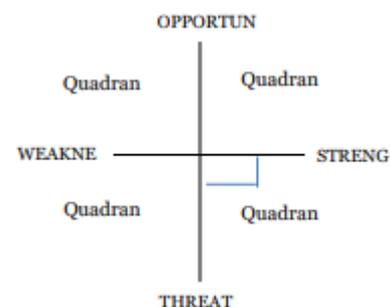
Faktor Eksternal Utama	Bobot	Rating	Skor
<b>Kesempatan (opportunity)</b>			
1) Tercapainya target pemenuhan pasokan minyak atsiri	7,4	2	3,6
2) Meningkatnya ekonomi masyarakat	3,7	3	1,8
3) Meningkatkan potensi daerah	4,3	2	2,1
4) Meningkatnya pendapatan asli daerah	4,1	3	2
5) Menurunnya angka pengangguran	5,6	3	2,7
6) Bertambahnya lapangan pekerjaan	3,7	3	1,8
7) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	7,2	3	3,5
8) Meningkatnya UMKM	4,5	3	2,2
9) Meningkatnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	4,5	3	2,2
10) Meningkatnya koordinasi antar dinas dan masyarakat	3,5	2	1,7
<b>Total Kesempatan</b>	<b>48,6</b>	<b>27</b>	<b>23,6</b>
<b>Ancaman</b>			
1) Tidak terpenuhinya permintaan minyak atsiri	5,3	3	2,6
2) Tidak adanya peningkatan ekonomi masyarakat	5,3	3	2,6
3) Angka pengangguran bertambah seiring bertambahnya waktu	4,1	3	2
4) Masih adanya ego sektoral	7,2	3	3,5
5) Pemerintah sebagai penentu kebijakan karena tidak adanya pelibatan masyarakat	4,5	3	2,2
6) Lahan tidak dimanfaatkan	4,7	3	2,3
7) Potensi daerah tidak diberdayakan	4,5	3	2,2
8) Masyarakat bersikap apatis pada pembangunan ekonomi	7,2	3	3,5
9) Petani tanaman nilam semakin terpuruk dengan adanya pengepul curang	4,1	3	2
10) Peran UMKM tidak meningkat	4,3	3	2,1
<b>Total Ancaman</b>	<b>51,4</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
<b>Total O-T</b>	<b>100</b>	<b>57</b>	<b>48,6</b>

Berdasarkan pada hasil penghitungan tersebut, maka dapat ditentukan kuadran dengan menggunakan penghitungan berikut.

$$X = 29,3 - 26,1 = 3,2$$

$$Y = 23,6 - 25 = -1,4$$

Dengan demikian, maka analisa yang akan digunakan dengan menggunakan SWOT ini terletak pada kuadran II sebagai berikut.



Gambar 1. Kuadran SWOT

IFAS	Kekuatan (strength)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya aturan atau regulasi ekonomi</li> <li>Adanya dokumen perencanaan Rentra mengenai pembangunan infrastruktur Aceh</li> <li>Adanya potensi dukungan dinas terkait</li> <li>Adanya lahan tanaman nilam</li> <li>Adanya pengalaman petani dalam pembudidayaan tanaman nilam</li> <li>Adanya pangsa pasar potensial</li> <li>Adanya dukungan masyarakat</li> <li>Adanya standarisasi kualitas produk</li> <li>Adanya referensi pengembangan kualitas minyak atsiri</li> <li>Adanya dukungan sumber daya manusia</li> </ol> <p>Strength = 1,75</p>	Kelurahan (weakness)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan identifikasi masalah untuk kebijakan pengembangan potensi minyak atsiri</li> <li>Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan</li> <li>Tidak ada analisa mengenai potensi lahan daerah lain</li> <li>Kurangnya inovasi dalam pengembangan potensi minyak atsiri</li> <li>Kurangnya minat masyarakat dalam pengembangan potensi minyak atsiri</li> <li>Adanya ego sektoral</li> <li>Kurangnya koordinasi</li> <li>Kurangnya anggaran pengembangan dan inovasi</li> <li>Kurangnya pendampingan dari pemerintah</li> <li>Kurangnya kebijakan</li> </ol> <p>Weakness = 1,57</p>
	EFAS	Alternatif Strategi S-O	Alternatif Strategi W-O	
Kesempatan (opportunity)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan untuk mendukung pengembangan potensi minyak atsiri</li> <li>Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam hal pembuatan program pemerintah</li> <li>Pembeladayaan dinas-dinas terkait pengembangan potensi minyak atsiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>Membuat program unggulan pemerintah daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisa potensi daerah dan lahan pada seluruh wilayah Aceh</li> <li>Memerankan ego sektoral dengan koordinasi antar dinas</li> <li>Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan potensi minyak atsiri</li> </ol>		
7) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Bobot strength-opportunity = 3,08	Bobot weakness-opportunity = 2,9		
8) Meningkatnya UMKM				
9) Meningkatnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan				
10)Meningkatnya koordinasi antar dinas dan masyarakat				
Opportunity = 1,33	Alternatif Strategi S-T	Alternatif Strategi W-T		
Ancaman (threat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelibatan masyarakat dengan membentuk forum komunikasi antar dinas dan masyarakat</li> <li>Pembastan grand desain pengembangan potensi minyak atsiri di provinsi Aceh</li> <li>Implementasi ekonomi Pancasila dalam menanggulangi praktik ekonomi yang merugikan pihak lain</li> <li>Mengimplementasikan collaborative governance</li> </ol> <p>Bobot strength-threat = 3,26</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Kerjasama inovasi dan pengembangan proses produksi minyak atsiri</li> <li>Pembastan kebijakan harga jual minyak atsiri</li> <li>Adanya program perdagangan khusus minyak atsiri</li> </ol> <p>Bobot weakness-threat = 3,08</p>		
1) Tidak tepenuhnya permintaan minyak atsiri				
2) Tidak adanya peningkatan ekonomi masyarakat				
3) Angka pengangguran bertambah seiring bertambahnya waktu				
4) Masih adanya ego sektoral				
5) Penerintah sebagai peneruit kebijakan karena tidak adanya pelibatan masyarakat				
6) Lahan tidak dimanfaatkan				
7) Potensi daerah tidak diberdayakan				
8) Masyarakat berakip apatis pada pembangunan ekonomi				
9) Petani tanaman nilam semakin terpuruk dengan adanya pengepul cacing				
10) Perus UMKM tidak meningkat				
Threat = 1,51				

### 3. Pembahasan Hasil Analisa

Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan analisis SWOT, Tabel IFAS dan EFAS, maka strategi yang digunakan dalam analisa ini adalah strength-threat dengan perolehan skor 3,26. Adanya hasil tersebut maka strategi yang dilakukan untuk pengembangan potensi minyak atsiri adalah memaksimalkan kekuatan untuk meminimalisir ancaman.

Pengembangan potensi minyak atsiri di Provinsi Aceh telah dianalisa untuk membangun strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Adapaun strategi yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut.

#### a. Implementasi *collaborative governance*

Untuk mengimplementasikan *collaborative governance* harus mempertimbangkan model yang

akan digunakan, yakni dengan cara melakukan diagnose model logis sebagaimana dihasilkan dari kajian Emerson et al., (2012), yakni sebagai berikut.

- 1) Konteks sistem  
Kondisi sumber daya, kerangka aturan, kegagalan yang pernah terjadi, kondisi politik, jaringan, level konflik atau kepercayaan, sosial ekonomi/budaya, kesehatan dan perbedaan.

- 2) Penggerak  
Penggerak untuk dapat mengimplementasikan *collaborative governance* adalah kepemimpinan, konsekuensi insentif, saling ketergantungan dan ketidakpastian.

- 3) Komitmen prinsip  
Komitmen prinsip yang harus dijaga dalam implementasi *collaborative governance* adalah penemuan, defisini, pertimbangan dan musyawarah.

- 4) Sharing Motivasi  
Sharing motivasi atau saling berbagi motivasi antar anggota dalam *collaborative governance* meliputi adanya rasa saling percaya, saling memahami, legitimasi internal dan saling berbagi komitmen.

- 5) Kapasitas untuk bergabung dalam tindakan  
Untuk mewujudkan *collaborative governance* dibutuhkan prosedur

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan peran untuk masing-masing anggota, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya.

6) Hasil tindakan kolaborasi

Ada beberapa tindakan hasil kolaborasi yakni mengamankan dukungan, kebijakan, pembangunan, monitoring dalam pelaksanaan, penegakan aturan, perijinan dan penggunaan sumber daya.

7) Adaptasi

Adaptasi dilakukan sesuai dengan kondisi dan bidang yang dijadikan objek kajian

Berdasarkan *diagnose model logis*, maka *collaborative governance* yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan potensi minyak atsiri adalah menentukan konteks sistemnya terlebih dahulu yakni dalam hal analisa kondisi politik, level konflik Aceh, kondisi sosial ekonomi, pengalaman kegagalan dalam pengelolaan potensi minyak atsiri dan sumber daya tanaman nilam yang akan dikembangkan. Selanjutnya dalam hal penggerak, pemerintah harus menentukan masing-masing peran anggota yang tergabung dalam kolaborasi sehingga akan tercipta saling membutuhkan dan ketergantungan untuk menghilangkan ego sektoral, menimbulkan saling

kepercayaan dan komitmen untuk maju. Selanjutnya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya juga dibutuhkan peran dalam dalam porsi yang berbeda sesuai dengan kompetensinya.

b. Pembuatan grand desain

Untuk pengembangan potensi minyak atsiri dibutuhkan pembuatan grand desain sehingga arah pengembangan potensi local dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lain. Pembuatan grand desain dimotori oleh bappeda yang mempunyai leading sector dalam hal perencanaan.

Pada konteks pengembangan potensi minyak atsiri grand desain dibuat dengan membuat arah pertumbuhan pembangunan yang dilakukan untuk pengembangan potensi. Penentuan arah pembangunan tersebut dapat dilakukan breakdown kegiatan tahunan untuk mempermudah implementasi. Disisi lain, peran masing-masing stakeholder dalam pengembangan potensi harus dijelaskan sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih peran.

c. Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila sebagaimana telah diuraikan di atas adalah menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak hanya didasari untuk mencari keuntungan

tetapi juga mempunyai nilai-nilai moral yang harus diwujudkan. Pada praktik perdagangan minyak atsiri, munculnya pengepul yang memberikan harga murah pada petani tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila, namun terdapat eksploitasi pada petani. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dinas perdagangan, dinas koperasi dan UMKM dapat membentuk koperasi untuk menampung hasil minyak atsiri dari petani dengan harga yang rasional, disisi lain hadirnya koperasi dapat memberikan bantuan dana bagi petani, serta dilakukan pendampingan usaha sehingga petani dan pelaku usaha minyak atsiri dapat meningkatkan ekonomi

## KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan pada kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi pengelolaan potensi minyak atsiri di Provinsi Aceh masih memiliki kelemahan karena adanya ego sektoral masing-masing dinas, kurangnya koordinasi, kurangnya anggaran pengembangan, tidak adanya pendampingan pengembangan usaha, tidak adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung usaha dan kurangnya inovasi.
2. Untuk melakukan perbaikan atas kelemahan tersebut maka diperlukan strategi yang dianalisa dengan menggunakan analisis PETEL yakni untuk melakukan pengembangan potensi minyak atsiri dibutuhkan peran aktif pemerintah melalui kolaborasi dinas terkait dan masyarakat mulai dari tahap

perencanaan, implementasi sampai evaluasi dengan komitmen pada pembangunan Aceh.

3. Pembuatan strategi untuk pengembangan potensi minyak atsiri juga dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT yakni dengan kombinasi kekuatan-ancaman. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan collaborative governance, membuat grand desain pengembangan potensi minyak atsiri dan pengembangan ekonomi Pancasila.

Hasil kajian ini direkomendasikan pada beberapa pihak berikut.

1. Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam  
Gubernur Aceh melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Aceh dalam hal pembahasan pengembangan potensi minyak atsiri. Koordinasi tidak hanya dilakukan dengan dinas tetapi juga dengan pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan *collaborative governance*. Implementasi *collaborative governance* oleh pemerintah provinsi tidak hanya dari sisi perencanaan tetapi juga implementasi dan evaluasi. Adanya *collaborative governance* tersebut maka kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Aceh sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Disisi lain, untuk menindaklanjuti

pembangunan ekonomi Pancasila, maka Gubernur wajib bersikap tegas dengan membuat regulasi yang mengatur system perdagangan minyak atsiri di Provinsi Aceh dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada petani dan meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Kepala Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Aceh

Kepala daerah dengan menggandeng seluruh dinas terkait, pihak swasta dan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan potensi minyak atsiri harus melakukan identifikasi potensi masing-masing daerah untuk pengembangan potensi minyak atsiri, yang disesuaikan dengan potensinya karena tidak semua daerah dapat mempunyai lahan yang cocok untuk tanaman nilam. Partisipasi daerah dapat dilakukan dalam usaha lain, misalnya penyulingan dan produksi bahan yang dibutuhkan masyarakat, misalnya produksi obat, kosmetik dan lainnya.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Bappeda dapat menjadi coordinator untuk implementasi *collaborative governance* yakni dengan cara membuka komunikasi dan menjadi penghubung antar dinas, pihak swasta dan masyarakat. Kepala Bappeda harus menggerakkan seluruh pejabat fungsional perencana untuk selalu melakukan kajian yang berhubungan dengan pengembangan potensi minyak atsiri dari sisi pendekatan teknokratik, yakni

membuat policy paper, policy brief, policy research dan lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar atau referensi untuk mengambil kebijakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, B. (2021). *Analisis Peningkatan Nilai Jual Produk Inovasi Minyak Atsiri dengan Standarisasi Produk*.
- Akbar, A. (2020). Peran Pemerintah Dalam Memaksimalkan Minyak Nilam. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 193–202. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.551>
- Anwar. (2015). *Petani Nilam Aceh Kewalahan Penuhi Permintaan Pasar*. Antara News. <https://aceh.antaranews.com/berita/27314/petani-nilam-aceh-kewalahan-penuhi-permintaan-pasar?>
- Cahyani, C., & Nirwana, W. O. C. (2018). Pemberdayaan Kelompok Usaha Berbasis Minyak Atsiri Di Desa Kesamben, Blitar. *Journal of Innovation and Applied Technology*, 4(1), 595–600. <https://doi.org/10.21776/ub.jiat.004.01.10>
- Creswell, J. W., & Creswell, D. J. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methode Approaches. Fifth Edition*. Sage.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Fikayuniar, L., Hamjah, R., Marsada Ukur Ujung, R., Fatiha Nurulhadi, Z., & Buana Perjuangan Karawang Abstrak, U. (2023). Literature Review Artikel: Manfaat Minyak Atsiri Kamboja Menggunakan Berbagai Metode. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 517–524.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8248076>
- Fitri, N., & Mohammad, D. (2015). Pengembangan Model Techno-Industrial Cluster Minyak Atsiri. *Ajie*, 4(3), 181–190.  
<https://doi.org/10.20885/ajie.vol4.iss3.art5>
- Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The Challenge of Collaborative Governance. *Public Management: An International Journal of Research and Theory*, 2(3), 337–358.  
<https://doi.org/10.1080/1471903000000021>
- Ilmar, A. (2012). *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Kencana.
- Jenderal, D. P. (2012). *Budidaya Tanaman Nilam*. Kementerian Pertanian.  
<http://ppid.pertanian.go.id>
- Marbun, S. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. UII Press.
- Mayangsari, Dita, F., Safitri, P. G. A., Khasanah, U., & Khotimah, K. (2022). “UJI KARAKTERISTIK FISIK DAN HEDONIK DARI AROMATHERAPY HAND CREAM YANG MENGANDUNG MINYAK MELATI: PHYSICAL CHARACTERISTICS AND HEDONIC TEST OF AROMATHERAPY HAND CREAM WITH JASMINE OIL. *Medical Sains: Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 7(2), 171–176.
- Mustamin, Y. (2015). Pengembangan Minyak Atsiri Tumbuhan Indonesia Sebagai Potensi Peningkatan Nilai Ekonomi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, MAY, 1–7.  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2604.6883>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88.  
<https://doi.org/10.2307/257670>. Poerwanto.
- Nufiar. (2015). QANUN: TATA CARA PEMBUATAN QANUN (Catatan Terhadap Praktek Pebuatan Qanun Aceh). *Tahqiqqa*, 9(1), 62–71.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rahim, T. A. (2018). ANALISIS ACEH DAN PERSOALAN POLITIK IDENTITAS. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 01(3), 1–23.
- Rizka Zulas, K., Sari, N., & Syifa Fadrizha Nanda, T. (2019). Pengaruh Religiositas Dan Faktor Sosial Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah Di Kota Banda Aceh. *JIHBIZ: Global Journal Of Islamic Banking And Finance*, 3(1), 1–16.
- Rohmah, M. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Indonesia.

- National Conference On Economic Education*, 1633–1643.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/267024163.pdf>
- Sari, N., & Nusuary, F. M. (2023). Arah Kebijakan Pemerintah Aceh Pasca Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam Mewujudkan Perdamaian Positif di Aceh. *Journal Of Political Sphere*, 4(1), 45–58.  
<https://jurnal.usk.ac.id/JPS/article/view/32501>
- Voets, J., Brandsen, T., Koliba, C., & Verschuere, B. (2021). *Collaborative Governance*. In *Oxford research encyclopedia of politics*. June, 1–21.
- Wiejaya, S., Syah, T. Y. R., Negoro, D. A., & Iskandar, M. D. (2023). Analisis Kelayakan Investasi Dan Kinerja Keuangan Pada Usaha Minyak Atsiri Melati Di Pt. Agrindo Sumber Harum. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1935–1951.  
<https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3521>